

# Presidensi Indonesia Dalam G20 Tahun 2022: Menuju Tata Kelola Ekonomi Global yang Inklusif dan Berkelanjutan

## Author:

Hadi Prayitno  
Dani Setiawan,  
Dita Nurul Aini,  
Lukman Hakim,  
Ulfa Purwaningsih,  
Try Wahyu Widha

## The Reform Initiatives

## Phone

+62 81 | 99 5259

## Email

tri.indonesia01@gmail.com

## Website

www.tri.or.id

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 7  
Menteng, Jakarta Pusat

## Regulasi Ketenagakerjaan

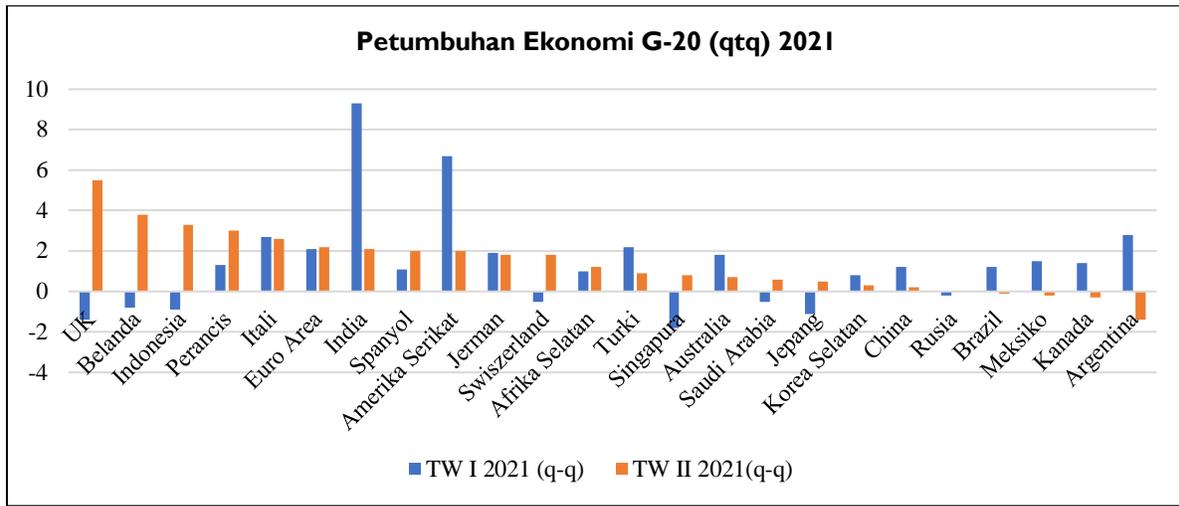
G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, 80% investasi global, dan 85% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

G20 menjalankan peran utama dalam pemulihan krisis keuangan global 2008 dan setelahnya. Mendesain reformasi tata kelola keuangan global yang lebih terkoordinasi, menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter, mendorong reformasi lembaga keuangan internasional seperti Lembaga Moneter Internasional dan Bank Dunia, termasuk isu-isu pembangunan global lain seperti kemiskinan, lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Peran G20 semakin penting, terutama mendorong koordinasi di tingkat global dalam penanganan pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan dampak pada perekonomian global. Salah satunya bisa dilihat dari perekonomian sebagian besar negara-negara di dunia yang tumbuh negative bahkan resesi. Berdasarkan data Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi dunia 2020 hanya mencapai -3,5% (yoy). Estimasi pertumbuhan ekonomi global pada 2021 ditargetkan mencapai 5,6%. Pada TW I pertumbuhan ekonomi Singapura berkontraksi sebesar -1,8% (qtq), UK sebesar -1,4% (qtq), Jepang sebesar -1,1% (qtq), Indonesia -0,9% (qtq), Belanda -0,8% (qtq), Switzerland dan Saudi Arabia sebesar -0,5 (qtq), Rusia sebesar -0,2% (qtq). Pertumbuhan ekonomi TW II sudah menunjukkan perbaikan karena pandemi sudah mulai bisa diatasi.

Dari seluruh anggota G-20 hanya tersisa 4 negara yang pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yaitu Brazil sebesar -0,1% (qtq), Meksiko sebesar -0,2% (qtq), Kanada sebesar -0,3 (qtq), dan Argentina sebesar -1,4% (qtq). Pasca pandemi, dunia masih harus mendorong perekonomian yang bergerak lambat saat ini yang diimbangi dengan peningkatan vaksinasi COVID-19 untuk membentuk herd immunity global. Negara-negara terus berjibaku mendorong pemulihan ekonomi hingga saat ini.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara G-20 Triwulan I dan II



Sumber: trading economy, 2021

### Agenda Indonesia pada KTT G20 Roma

Dalam pertemuan KTT G20 di Roma, Italy 30-31 oktober lalu, Pemerintah Indonesia mendorong sejumlah agenda, di antaranya: Pemulihan kesehatan akibat pandemi COVID-19, penguatan sektor keuangan, dan mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pada isu SDGs Indonesia menyampaikan perlunya sejumlah upaya bersama untuk memastikan SDGs tercapai sesuai target. Tiga upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain:

1. Menggalang solidaritas untuk membantu negara dan masyarakat yang paling rentan.
2. Memperkuat kemitraan global untuk membantu pendanaan dan akses teknologi bagi negara berkembang.
3. Meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketangguhan terhadap guncangan dan ketidakpastian masa depan, terutama di sektor kesehatan, kapasitas fiskal, serta kapasitas perencanaan dan implementasi pembangunan.

Indonesia juga mendorong pembentukan *Join Health and Finance Task Force* yang akan dibentuk sebagai lembaga gugus tugas kerjasama kesehatan dan ekonomi internasional. Program ini merupakan bagian dari rancangan Presiden Jokowi dalam membangun arsitektur kesehatan global, sebuah kerjasama internasional untuk sama-sama menyelamatkan dunia dari ancaman kesehatan.

### Hasil Kesepakatan dan Posisi Indonesia pada G20 2021

Pertemuan G20 di Roma para pemimpin negara telah menyepakati beberapa isu krusial yang dihadapi oleh dunia saat ini, antara lain:

1. Perubahan Iklim  
Isu perubahan iklim merupakan salah satu isu penting yang akan dibahas para pemimpin global dan diharapkan mencapai kesepakatan yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim terutama Indonesia sebagai pemilik hutan tropis terbesar di dunia. Indonesia menekankan bahwa penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs serta diperlukan kerjasama antar negara.

Beberapa kesepakatan yang telah disetujui para kepala negara yaitu:

- a. Para pemimpin negara sepakat untuk mencegah pemanasan bumi hingga 1,5 derajat Celcius diatas tingkat pra-industri, sayangnya tidak ada batasan waktu yang spesifik yang ditetapkan dalam KTT ini untuk mencapai netralitas karbon.
- b. Para pemimpin negara sepakat untuk menghentikan pembiayaan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di luar negeri pada akhir tahun ini namun belum ada kepastian terkait penghentian penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri yang telah beroperasi. Para pemimpin juga mendiskusikan percepatan transisi dari batu bara dengan energi terbarukan sejalan dengan perjanjian Paris.
- c. Penegasan kembali komitmen yang sejauh ini belum terpenuhi yaitu mobilisasi 100 miliar dollar bagi negara-negara berkembang untuk biaya adaptasi dalam perubahan iklim.

## 2. Perpajakan

Isu kedua yaitu perpajakan global yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pemulihan ekonomi guna mewujudkan tata kelola ekonomi dunia yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan yang salah satunya melalui reformasi sistem perpajakan internasional yang lebih adil. Selain itu, salah satu agenda pembahasan isu perpajakan terkait dalam rangka mempersulit ruang gerak perusahaan teknologi dunia seperti Google, Amazon, Facebook, Microsoft, hingga Apple untuk menghindari pajak dengan mendirikan kantor di yurisdiksi pajak rendah.

Kesepakatan isu perpajakan yang dicapai yaitu:

- a. Pimpinan negara peserta G20 mendukung rencana penerapan pajak perusahaan minimum global sebesar 15 persen, khususnya negara yang berada di bawah naungan OECD. Rencana mengimplementasikan ketentuan baru pajak global akan diberlakukan pada 2023 mendatang.
- b. Pimpinan negara menyepakati reformasi sistem perpajakan internasional yang adil yaitu dilakukan dengan pengalokasian hak pemajakan secara adil ke negara yang cenderung menjadi pasar produk barang dan jasa digital (negara pasar) yang dikenal dengan **pilar 1** serta pemastian bahwa semua perusahaan multinasional (Multinational Enterprises/MNEs) membayar pajak minimum di semua tempat MNEs beroperasi atau yang disebut dengan **pilar 2**.
- c. Pimpinan negara sepakat untuk mengenakan tarif pajak minimum pada MNEs yang memiliki peredaran bruto tahunan lebih dari EUR 750 juta. Dengan pajak minimum pada Pilar 2, tidak akan ada lagi persaingan tarif yang tidak sehat di antara negara-negara yang selama ini terjadi. Pilar 2 yang dikenal dengan sebutan Global anti-Base Erosion (GLoBE) rules yang akan memastikan MNEs dikenakan tarif pajak minimum sebesar 15 persen.

## 3. Vaksinasi

Para pemimpin dalam G20 sepakat dan berjanji untuk mendukung tujuan WHO untuk melakukan vaksinasi setidaknya 40 persen populasi dunia pada 2021 dan 70 persen pada pertengahan 2022. Untuk mencapai tujuan tersebut akan dilakukan peningkatan pasokan vaksin COVID-19 di negara berkembang dan menghilangkan kendala pasokan dan pembiayaan. Selain itu juga pengakuan terkait vaksin COVID-19 yang dianggap aman dan manjur oleh WHO.

## 4. Ekonomi Global

Pemulihan ekonomi global menjadi agenda bersama dalam rangka pemulihan krisis akibat pandemi COVID-19. Permasalahan peningkatan inflasi, diikuti oleh lonjakan harga energi, serta terhambatnya rantai pasok menjadi beban ekonomi dunia saat ini. Para pemimpin G20 memutuskan untuk tidak tergesa-gesa menghapus stimulus nasional. Sementara permasalahan inflasi akan dilakukan intervensi oleh Bank Sentral sesuai dengan kebutuhan, termasuk stabilitas harga. Para pemimpin juga menyepakati untuk memantau dan mengatasi gangguan dalam rantai pasok yang berdampak pada ekonomi global.

5. *Special Drawing Right (SDR)*

Selain itu krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 mendorong para pemimpin G20 sepakat untuk menetapkan target baru untuk menyalurkan USD 100 miliar ke negara-negara termiskin. Bantuan sebesar USD 650 miliar disediakan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) melalui penerbitan baru *Special Drawing Rights (SDR)*. SDR bukanlah mata uang, tetapi alat bantu mata uang cadangan negara-negara berkembang untuk stabilisasi mata uang. SDR dapat digunakan untuk membiayai investasi.

Selain kesepakatan global yang disetujui oleh 20 negara anggota, Indonesia juga mencapai kesepakatan bilateral dengan sesama negara anggota. Beberapa kesepakatan bilateral antara lain:

- a) Kesepakatan Indonesia – Australia tentang energi dan perubahan iklim, ketersediaan energi yang terjangkau, dan ekonomi digital terutama pada aspek kebijakan dan regulasi.
- b) Kesepakatan Indonesia – Perancis tentang pembangunan industri green hidrogen dan investasinya serta kerjasama alutsista
- c) Kesepakatan Indonesia - Uni Eropa terkait dengan perdagangan yaitu akselerasi Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU CEPA)
- d) Kesepakatan Indonesia – Turki kerjasama tentang minyak sawit (CPO)
- e) Kesepakatan lain yaitu digitalisasi UMKM

Sebelumnya pertemuan tingkat kepala negara (KTT), Business 20 (B20) telah dilaksanakan pada 7-8 Oktober 2021, dimana Indonesia resmi memangku presidensi Business 20 untuk periode tahun 2022. B20 adalah forum dialog global yang terdiri dari para pebisnis dunia, khususnya yang berasal dari negara-negara G20. G20 secara konsisten menyusun tujuan, rekomendasi kebijakan dengan target implementasi yang jelas dan fokus pada pertumbuhan ekonomi serta perkembangan masing-masing negara anggota khususnya pada kegiatan ekonomi dan sektor bisnis.

Sebagai negara penerima presidensi untuk KTT G20 periode 2022, pemerintah Indonesia telah resmi menunjuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk menjadi pihak penanggung jawab penyelenggara forum B20 pada 2022. Dalam B20 Indonesia bersama KADIN akan melakukan sosialisasi, konsultasi, dan advokasi dengan sejumlah asosiasi bisnis dan usaha Indonesia atas prioritas-prioritas yang diusung dalam Presidensi B20 Indonesia.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dunia pasca pandemi, komunitas bisnis perlu memastikan terkait proses pemulihan ekonomi terlaksana secara inklusif, berkelanjutan, dan memiliki ketahanan terhadap kondisi tidak terduga. KADIN Indonesia berkomitmen akan menciptakan penekanan dan pendekatan yang berbeda dengan mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan pemulihan negara maju dan negara berkembang. Presidensi B20 Indonesia akan berfokus kepada tiga visi utama, yaitu:

1. Mengupayakan pemulihan dan pertumbuhan yang kolaboratif,
2. Mendorong terciptanya ekonomi global yang inovatif,
3. Mewujudkan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, forum C20 merupakan jalur partisipasi resmi masyarakat yang tergabung dalam *Civil Society Organization (CSO)* pada forum G20 yang berperan memberikan input substansi dan kebijakan baru bagi pemerintah dan secara kolektif. CSO dengan para wakil menteri keuangan negara G20 membuat beberapa kesepakatan yaitu:

1. Pemulihan pandemi serta memastikan akses vaksinasi untuk semua negara.
2. Pendanaan pembangunan untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi di negara berkembang sebesar USD2,5 triliun.
3. Mendorong pelaksanaan dan pendanaan SDGs, khususnya negara miskin dan berkembang. Dalam hal ini Pemerintah Italia akan mendorong pelaksanaan SDGs untuk menjadi kesepakatan global serta memastikan arah dan pendekatan pembangunan hijau dan berkelanjutan (*low carbon development, non fossil fuels, dll*)

4. Mendorong sistem pajak global dengan metode baru (*unitary formula system*) untuk menghindari pengelakan pajak dan penghindaran pajak bagi perusahaan-perusahaan multinasional dan juga pajak digital (*digital taxation*).

Dari sisi pemuda yang diakomodasi melalui forum Y20. Kesepakatan forum ini antara lain: inklusi keuangan, politik dan pendidikan bagi pemuda dalam rangka pembangunan yang inklusif. Salah satu isu penting yang dibahas dalam forum ini mengenai ketersediaan lapangan kerja bagi pemuda dan perempuan.

### **Kesiapan Indonesia Memangku Presidensi G-20**

Dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Roma, Italia, Indonesia menerima presidensi G-20 untuk tahun 2022. Serah terima presidensi dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Oktober 2021, dan mulai berlaku efektif sejak 1 Desember 2021 – 30 November 2022. Ini adalah kali pertama bagi Indonesia memegang presidensi G-20 sejak dibentuk pada 2008. Suatu kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk terlibat menentukan desain tata kelola pembangunan dan perekonomian global.

G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun sejak 2008, G20 menghadirkan Kepala Negara dalam KTT dan pada 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu G20 terdiri atas Jalur Keuangan (*Finance Track*) dan Jalur Sherpa (*Sherpa Track*). Sherpa diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT (*Summit*).

G-20 adalah forum ekonomi global yang memiliki pengaruh penting hingga saat ini. Perekonomian negara-negara G-20 sangat besar, oleh sebab itu sangat menentukan dalam mendesain arah kebijakan pemulihan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Sehingga diharapkan negara-negara G-20 menjadi *role model* bagi masyarakat internasional.

Pemulihan ekonomi dunia mendapatkan tantangan barunya. Pandemi COVID-19 menghantam hampir seluruh negara di dunia dan telah menimbulkan kerusakan serius pada sektor ekonomi dan sosial. Situasi ekonomi dunia saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Meskipun tren positif pertumbuhan ekonomi global telah dimulai, tetapi terdapat ketidakseimbangan yang nyata proses pemulihan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang atau *emerging countries*. Di saat negara-negara maju sudah mulai menuai hasil positif pertumbuhan ekonomi dan normalisasi kebijakan ekonomi, negara-negara miskin dan berkembang masih berkutat dalam pemulihan yang membutuhkan dukungan stimulus yang besar dari negara.

Situasi kesehatan juga belum sepenuhnya pulih. Meskipun WHO memperkirakan 40 persen populasi dunia sudah vaksinasi pada akhir tahun 2021, 70 persennya diharapkan bisa dilakukan pada pertengahan tahun 2022. Hal ini sangat bergantung pada produksi dan distribusi vaksin yang merata, khususnya bagi negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.

Secara geopolitik, kerentanan juga masih nampak akibat rivalitas kekuatan negara-negara besar yang memicu terjadinya gangguan dalam bidang keamanan, perdagangan dan investasi di tingkat regional dan global. Diperlukan suatu upaya nyata untuk membangun suatu hubungan yang saling percaya, kerja sama, solidaritas, kemitraan, dan inklusivitas untuk menghasilkan spirit kolektif bersama-sama pulih.

Presidensi Indonesia pada G20 menjadi peluang strategis. Mendorong desain pembangunan global yang inklusif, dalam arti melibatkan semua pihak, termasuk pemuda, perempuan, masyarakat madani, perguruan tinggi, kelompok bisnis yang menjadi acuan utama dalam menyusun agenda-agenda ke depan. Termasuk tidak hanya memperhatikan kepentingan anggota, namun secara aktif menyuarakan kepentingan di luar anggota, yaitu negara berkembang dan kelompok-kelompok rentan. Sebagaimana tema yang diusung Indonesia: *Recover Together, Recover Stronger*.

Kesiapan Indonesia untuk menjalankan presidensi G-20 bisa dilihat dari diterbitkannya Keputusan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Keppres ini meliputi pembentukan panitia nasional dan tugas-tugas yang dilakukan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan rangkaian pertemuan presidensi G20 pada tahun 2021 dan tahun 2022. Pemerintah menyatakan akan melaksanakan sekitar 150 pertemuan sepanjang tahun. Diantaranya pertemuan pimpinan negara (KTT), 17 pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, 10 Deputi Meeting, dan lebih dari 100 pertemuan *working group/engagement group/side events*.

Rangkaian pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi Indonesia. Dari sisi ekonomi bisa meningkatkan konsumsi domestik, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Bruto. Tetapi lebih dari itu, moment ini harus dimanfaatkan pemerintah Indonesia untuk mengarahkan agenda dan kebijakan tata kelola pembangunan internasional yang lebih kokoh. Mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, memberikan perhatian yang kuat pada sektor UMKM dan mendorong ekonomi digital sebagai motor baru ekonomi.

Selain itu, Pemerintah Indonesia dapat memimpin penyusunan rumusan-rumusan yang kuat untuk mendorong fasilitas pembiayaan hijau untuk menciptakan transformasi ekonomi yang hijau dan berkelanjutan. Termasuk melanjutkan agenda reformasi arsitektur keuangan global. Memperkuat jaring pengaman keuangan internasional dan menciptakan keberlanjutan pengelolaan utang yang sehat dan transparan.